

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan pemerintah merupakan jenis organisasi nirlaba yang memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat umum, seperti meningkatkan keselamatan, kualitas pendidikan dan kualitas perawatan kesehatan. Sebagaimana wujud organisasi lainnya, badan pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi di mana badan pemerintah menggunakan uang tunai atau kas sebagai alat tukar yang dapat mengatur penerimaan dan pengeluaran uang untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

Uang tunai atau kas merupakan komponen penting dalam suatu instansi pemerintah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang selalu dapat dipakai sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan. Selain itu, melalui kas suatu instansi pemerintah dapat mengetahui proses terjadinya pengelolaan uang di masa kini dan dapat memperhitungkan keuangan di masa depan.

Keberadaan kas di instansi pemerintahan terjadi karena adanya proses penerimaan kas. Penerimaan kas merupakan unsur sumber daya yang sangat vital

dalam pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang pemerintah. Penerimaan kas mencakup transaksi-transaksi yang menyebabkan peningkatan jumlah saldo kas tunai dan/atau rekening bank yang dimiliki pemerintah daerah setempat, baik yang berasal dari penerimaan pendapatan tunai, penerimaan pengiriman uang (transfer), penerimaan pinjaman, atau penerimaan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan penerimaan kas, badan pemerintah harus merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol serta memberi pertanggungjawaban atas setiap wujud penerimaan kas menurut peraturan perundang-undangan yang sah sehingga diperlukan suatu sistem informasi akuntansi yang sanggup membantu pihak-pihak yang terkait dalam membuat keputusan. Sistem informasi akuntansi ini juga diharapkan dapat meminimalisasi kekeliruan yang terjadi, terutama sistem informasi akuntansi dalam hal penerimaan kas dari kegiatan yang dilakukan di instansi pemerintah dalam melayani masyarakat.

Berdasarkan Perda Provinsi Riau No. 4 Tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda Provinsi Riau adalah merujuk kepada pendapatan dari pemungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta Pajak Rokok. Dalam hal ini, pihak yang melakukan proses pemungutan PKB, BBNKB, dan PAP yaitu setiap cabang pelayanan pendapatan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 61 Tahun 2012 disebutkan bahwa : "Tugas utama

Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah yang secara teknis beroperasi di bidang keuangan.”

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas suatu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan ditenagai oleh peralatan teknis dalam bentuk mesin atau perangkat lain yang dirancang untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga penggerak suatu motor, mencakup di dalamnya alat-alat berat dan besar yang dalam mengoperasikannya menggunakan roda dan mesin serta tidak melekat secara permanen dan juga adalah kendaraan bermotor yang dioperasikan di perairan.

Dewasa ini kendaraan bermotor menjadi kebutuhan pokok, dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor akan semakin banyak pula wajib pajak yang harus membayarkan PKB, sehingga penerimaan di sektor pajak khususnya PKB akan semakin meningkat dan akan membawa kontribusi yang cukup besar pada realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Hal ini menjadikan penerimaan pendapatan daerah pada pemungutan PKB sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.

Untuk menciptakan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah pada pemungutan PKB yang direalisasikan dengan optimal dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah harus

memperhatikan strategi dalam penanganan pemungutan pendapatan daerah dengan cara meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak dan melakukan penatausahaan pendapatan daerah melalui sistem akuntansi penerimaan kas sehingga kebijakan yang sudah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan tepat dan akurat.

Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau terdiri dari 33 cabang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Sehubungan dengan banyak dan luasnya wilayah pelayanan di Riau, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di salah satu Cabang Pelayanan yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Memenuhi persyaratan dan kewajiban konstitusional untuk memberikan pelayanan yang amanah kepada wajib pajak dan pemilik kendaraan bermotor serta memberikan pelayanan yang lebih responsif, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau kini dibantu oleh sebuah aplikasi yang bernama *MySamsat*. Aplikasi *MySamsat* adalah salah satu inovasi yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Riau dimana mereka bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau, Korlantas Polri, Jasa Raharja Cabang Riau dan Bank Riau Kepri berupa layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Samsat Riau berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk memungkinkan pelayanan membayar Pajak Kendaraan Bermotor, SWDKLLJ, dan PNPB Pengesahan STNK secara online.

Aplikasi ini diharapkan dapat menciptakan keuangan daerah yang baik dan mencegah terjadinya *fraud*.

Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan menuangkan hasil penelitiannya dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “TINJAUAN ATAS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN KAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN TALUK KUANTAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana sistem dan prosedur penerimaan kas pada PKB di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?
- 2) Bagaimana penerapan pengendalian internal terkait penerimaan kas pada PKB di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penulisan yang harus dicapai penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Mengetahui sistem dan prosedur penerimaan kas pada PKB yang diterapkan Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

- 2) Mengetahui penerapan pengendalian internal terkait penerimaan kas pada PKB di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan ini adalah sistem dan prosedur serta sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam penerimaan kas pada PKB di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang dalam prosesnya dibantu oleh aplikasi *MySamsat* dalam penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain yang tertarik untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan judul yang telah diteliti oleh penulis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Manfaat Akademis
 - a. Kajian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan ilmu yang dimiliki terutama dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi.
 - b. Diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pengelolaan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada instansi pemerintahan.

2) Manfaat Teoritis

a. Bagi Penulis

Mengetahui penerapan sistem akuntansi penerimaan kas pada lembaga publik (instansi pemerintah) dan membandingkan pengetahuan teoritis dari perkuliahan dengan praktik di lapangan mengenai Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

b. Bagi Instansi

Menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan secara positif bagi instansi dalam meningkatkan kinerjanya khususnya dalam pengelolaan Sistem Akuntansi Penerimaan Kas pada PKB serta menjadi salah satu bahan evaluasi bagi instansi.

c. Bagi Pembaca

Dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat sebagai bahan referensi yang dapat membantu mendeskripsikan teori-teori praktis pada penelitian yang sejenis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum sekaligus menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi teori dan aturan sistem informasi akuntansi penerimaan kas PKB yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis, sekaligus aplikasi yang digunakan dalam pembayaran PKB.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi subbab metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil guna melaksanakan tinjauan. Bab ini juga memberikan penjelasan mengenai rumusan masalah yang telah dihimpun pada bab I beserta hasil pembahasan secara keseluruhan atas topik karya tulis ini. Landasan pembahasan pada BAB III didasarkan pada teori-teori yang telah dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan dokumen-dokumen sumber yang relevan serta studi lapangan serta wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran PKB.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan penutup yang berisi simpulan dari hasil tinjauan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan yang hendak dicapai adalah mengetahui bagaimana sistem dan prosedur serta penerapan pengendalian internal terkait penerimaan kas pada PKB di Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.